



MOBIL DIBATASI MAKSIMAL 5 LITER, SEPEDA MOTOR 1 LITER

Pemkot Yogya Siapkan Skema Pembatasan Bahan Bakar

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta mulai menyiapkan skema dalam upaya efisiensi anggaran dan penghematan energi. Selain rencana penerapan Work From Home (WFH), juga rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan dinas.

Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menjelaskan untuk skema WFH satu hari dalam sepekan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat. Sedangkan pemberlakuan sistem plafonisasi berupa pembatasan kuota BBM harian bagi kendaraan jabatan dan operasional.

Dalam skema plafonisasi yang baru, Hasto menetapkan batas maksimal konsumsi BBM yang cukup ketat. Kendaraan dinas operasional yang melekat pada pejabat akan dibatasi hanya sebesar lima liter per hari. Sementara itu, untuk kendaraan dinas roda dua atau sepeda motor, kuota dibatasi satu liter per hari.

Hasto Wardoyo menjelaskan kebijakan ini diambil untuk memastikan penggunaan fasilitas negara benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada produktivitas yang efisien. "Kita harus mulai melakukan penghematan yang terukur. Dengan skema

plafonisasi ini, kami memperkirakan Pemerintah Kota dapat menghemat konsumsi BBM hingga 30 persen dari total penggunaan biasanya," ujarnya, Senin (31/3).

Selain pembatasan BBM, Pemkot Yogyakarta juga akan menguji coba kebijakan bekerja dari rumah atau WFH sebanyak satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas kendaraan dinas secara signifikan di jalan raya, yang secara otomatis akan menurunkan angka pengeluaran daerah untuk sektor transportasi.

Hasto juga memberikan penegasan khusus kepada para kepala dinas dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih mandiri dan bijak dalam mengelola mobilitas mereka. Ia berharap para pejabat tidak lagi hanya bergantung pada alokasi BBM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kepala dinas harus menjadi contoh. Saya berharap mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan BBM dari APBD untuk setiap aktivitasnya. Ada ruang untuk efisiensi dan kemandirian yang harus kita bangun bersama demi keberlangsungan anggaran kota yang lebih sehat," tegasnya.

Kebijakan ini diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap postur anggaran daerah, mengingat beban belanja BBM merupakan salah satu komponen rutin yang cukup besar. Dengan penghematan mencapai 30 persen, alokasi anggaran tersebut nantinya dapat dialihkan untuk program-program pembangunan lain yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas.

"Kadang kan juga dipakai untuk pulang yang rumahnya jauh dari kota. Misal di kabupaten lain. Jadi misal kuota lima liter itu kurang, maka selebihnya harus ditanggung sendiri," katanya.

Pemkot Yogyakarta juga akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini untuk melihat efektivitasnya di lapangan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun dengan skema penghematan yang ketat. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005